

Analisis Formalisasi Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintahan Pada Kabupaten Buleleng

Ahmad Muksin^{1*}, Muhammad Rizki Dimas Setiawan², Muhammad Arief Naufal³,
Zeina Sekar Ayu Pramesti⁴, Al-Hildayanti⁵, Arkan⁶

¹⁻⁶Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Nasional

ARTICLE INFO

Article history:

Received November 05, 2023

Revised November 15, 2023

Accepted November 20 2023

Available online November 23, 2023

Kata Kunci:

Formalisasi, Organisasi, Efektivitas

Keywords:

Formalization, Organization, Effectiveness



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Yayasan
Daarul Huda

ABSTRAK

Tujuan analisis penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana formalisasi struktur organisasi pemerintahan berdampak pada kinerja organisasi. Dalam sebuah organisasi, struktur organisasi memastikan bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab yang sama dan bahwa pekerjaan akan dibagi secara merata. Kemampuan untuk bekerja secara efektif memenuhi persyaratan dan mematuhi semua aturan organisasi sangat penting untuk keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Dalam hal pencapaian tujuan kerja setiap pekerja, seseorang pekerja dianggap memiliki efektivitas kerja yang tinggi jika mereka mampu mencapai tujuan tersebut.

ABSTRACT

The purpose of this research analysis is to find out how the formalization of government organizational structures has an impact on organizational performance. In an organization, the organizational structure ensures that each member has equal responsibilities and that work will be divided equally. The ability to work effectively meeting the requirements and complying with all organizational rules is critical to an organization's success in achieving their goals. In terms of achieving each worker's work goals, a worker is considered to have high work effectiveness if they are able to achieve these goals.

PENDAHULUAN

Kepailitan merupakan suatu proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur litigasi yaitu melalui pengadilan niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau yang disingkat dengan UUK 2004. Sebelum diundangkannya UUK 2004, masalah kepailitan diatur dalam (Undang-undang tentang Kepailitan) yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Tidak dapat dipungkiri bahwa operasi setiap organisasi harus berubah seiring dengan perkembangan zaman dan era globalisasi. Dalam hal ini, organisasi menggambarkan suatu hubungan kerjasama yang terdiri dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Tingkat keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan akan meningkat jika kerjasama dilakukan dengan baik sesuai prosedur yang ada. Suatu organisasi adalah kumpulan orang yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dan bekerja sama untuk membangun hubungan yang baik agar tujuan tersebut dapat dicapai. Dalam struktur organisasi, karyawan perusahaan atau organisasi diposisikan berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Dalam sebuah organisasi, struktur organisasi memastikan bahwa setiap anggota memiliki tanggung jawab yang sama dan bahwa pekerjaan akan dibagi secara merata. Dengan demikian, terdapat dimensi struktur organisasi dalam organisasi. Dimensi struktur organisasi ini didasarkan pada penggunaan aturan, standar, dan dokumen tertulis.

Dengan kata "formalisasi" dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa formal pekerjaan dalam sebuah organisasi. Selain itu, dimaksudkan untuk menunjukkan seberapa tinggi organisasi menetapkan standar perilaku melalui aturan, prosedur, pelatihan, dan mekanisme

*Corresponding author

E-mail addresses: ahmad.muksin@civitas.unas.ac.id

lain yang relevan. Dalam formalisasi, output yang seragam dan konsisten dihasilkan oleh orang-orang yang melakukan tugas dengan cara atau proses yang sama dan input yang sama.

Dimensi formalisasi menekankan pada penerapan standarisasi dalam segala hal yang berkaitan dengan operasi organisasi. Dengan standar ini, anggota organisasi dapat mematuhi dan menggunakan standar untuk mencapai keberhasilan. Standarisasi organisasi tidak hanya menghilangkan kemungkinan anggota atau pegawai berperilaku secara berbeda, tetapi juga menghilangkan kebutuhan untuk mempertimbangkan alternatif. Semakin banyak standarisasi, makin sedikit masukan tentang bagaimana seorang pegawai harus melakukan tugasnya. Oleh karena itu, formalisasi memungkinkan standarisasi untuk mengatur perilaku anggota atau pegawai. Ini mengurangi keanekaragaman dan mendorong organisasi untuk bekerja sama.

KAJIAN PUSTAKA

Anggota organisasi dapat sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi. Jika tugas-tugas pekerjaan distandardisasikan dan ambiguitas diminimalkan, seperti pada struktur mekanik, beberapa orang dapat sangat produktif dan puas. Oleh karena itu, ketika orang berbicara tentang bagaimana desain organisasi memengaruhi perilaku karyawan, mereka harus mempertimbangkan setiap individu. Fakta umum menunjukkan bahwa spesialisasi pekerjaan secara konsisten meningkatkan produktivitas. Masalah muncul ke permukaan, dan produktivitas mulai terganggu ketika rutinitas merusak produktivitas. Produksi mulai menurun tampaknya lebih cepat dicapai dibandingkan sepuluh tahun sebelumnya karena tenaga kerja semakin terdidik dan sangat termotivasi, yang merupakan hal yang menguntungkan. Meskipun tidak diragukan lagi bahwa orang sekarang kurang toleran terhadap spesialisasi pekerjaan dibandingkan dengan zaman dahulu, masih ada tenaga kerja yang menyukai pekerjaan rutin dan sangat terspesialisasi. Beberapa orang menginginkan pekerjaan yang hanya membutuhkan sedikit pemikiran untuk pekerjaan rutin. Bagi orang-orang ini, pekerjaan yang memiliki spesialisasi yang tinggi adalah sesuatu yang membuat mereka puas dalam bekerja.

Menurut penelitian, tidak ada bukti yang mendukung hubungan antara rentang kendali dan kinerja karyawan. Secara alami, menarik untuk dikatakan bahwa rentang kendali yang luas memberikan lebih banyak ruang untuk inisiatif individu dan lebih sedikit jarak supervisi. Pada umumnya, organisasi yang kurang tersentralisasi memiliki lebih banyak orang yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Dan ada bukti bahwa kepuasan kerja terkait dengan pengambilan keputusan partisipatif. Namun, perbedaan individu kembali muncul. Pekerja dengan penghargaan diri yang rendah memiliki hubungan kuat antara kepuasan dan desentralisasi. Individu seperti ini memiliki penilaian yang tinggi pada pengambilan keputusan karena mereka percaya pada kemampuannya sendiri. bersama dengan tujuan untuk memastikan bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas akibat dari keputusan yang dibuat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan penelitian ini bukanlah untuk menguji hipotesis tertentu; sebaliknya, ia bertujuan untuk menjelaskan variabel, gejala, atau keadaan tertentu (Arikunto, 2010). Penelitian kualitatif, menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2016), melakukan analisis data secara interaktif. Dalam penelitian ini, teknik analisis data digunakan. Ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, pemilihan faktor penting, penekanan pada faktor-faktor tersebut, dan penyampaian data. Metode kualitatif ini untuk memahami fenomena sosial atau perilaku manusia, pendekatan kualitatif menggunakan perspektif deskriptif dan interpretatif. Penelitian ini mengambil tentang studi kasus yaitu jenis penelitian yang mempelajari satu atau beberapa kasus dengan fokus pada pemahaman yang mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Formalisasi dalam Struktur Organisasi Mempengaruhi Efektivitas Kinerja Pemerintahan

Formalisasi adalah mengubah sesuatu menjadi lebih formal, terorganisir, dan diatur sesuai dengan standar tertentu dikenal sebagai formalisasi. Sebuah istilah "struktur organisasi" mengacu pada kerangka atau rangkaian sistematis yang menetapkan cara kegiatan dan

tanggung jawab di dalam suatu organisasi atau entitas terorganisasi diatur. Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai "Rangkaian bekerja secara formal organisasi yang dengan rangkaian pekerjaan tersebut dengan pembagian kerja yang dikelompokkan dan dikoordinasikan" (Stephen P. Robbins, 2010:585).

Dalam struktur organisasi, formalitas mengacu pada penetapan dan penerapan aturan, prosedur, dan hierarki yang jelas. Dokumen seperti kebijakan, panduan, dan peraturan yang dibuat untuk mengatur aktivitas dan interaksi di dalam organisasi termasuk dalam kategori ini. Penetapan jabatan dan tanggung jawab adalah contoh formalisasi struktur organisasi. Ini melibatkan penjelasan jelas tentang peran dan tanggung jawab setiap anggota organisasi, mulai dari tingkat manajemen puncak hingga tingkat operasional terendah. Kemampuan untuk bekerja secara efektif memenuhi persyaratan dan mematuhi semua aturan organisasi sangat penting untuk keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan mereka. Dalam hal pencapaian tujuan kerja setiap pekerja, seseorang pekerja dianggap memiliki efektivitas kerja yang tinggi jika mereka mampu mencapai tujuan tersebut.

Struktur suatu organisasi sangat memengaruhi seberapa efektif kinerjanya. Di antaranya adalah:

- a) Struktur organisasi yang terstruktur membantu dalam menciptakan konsistensi dan keteraturan dalam menjalankan operasi sehari-hari. Aturan dan prosedur yang jelas meningkatkan kinerja.
- b) Struktur organisasi yang tepat memungkinkan pengelolaan yang lebih efisien dari sumber daya seperti manusia, keuangan, dan waktu. Pembagian tugas yang tepat memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang optimal. Struktur organisasi yang memungkinkan keterlibatan dan partisipasi dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi karyawan.
- c) Struktur organisasi yang tepat membantu mengarahkan upaya organisasi menuju pencapaian tujuan dan visinya.

Dampak Positif Formalisasi dalam Struktur Organisasi

Dalam memfokuskan upaya organisasi untuk mencapai visi dan tujuan formalisasi sebagai tingkat atau tingkat pembakuan (standarisasi) posisi dalam suatu organisasi. Jika tingkat formalisasi posisi tersebut tinggi, lingkup tugas dan metode pelaksanaannya baku. Akibatnya, pemegang jabatan yang ditugaskan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut hanya memiliki jumlah kebebasan terbatas dalam menetapkan tugas apa saja yang harus diselesaikan dalam jabatan, metode apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut, dan berapa lama tugas-tugas tersebut harus diselesaikan. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemangku jabatan dapat mengelola berbagai masukan (input) dan aktivitas jabatan dengan cara yang sama atau telah dibakukan, sehingga diharapkan bahwa keluaran (output) akan konsisten dan sebanding. Beberapa dampak positif formalisasi dalam struktur organisasi pemerintahan :

- a) Meningkatkan efektivitas organisasi: Penerapan formalisasi membantu organisasi untuk mengorganisir tugas dan tanggung jawab secara tegas dan terstruktur, sehingga dapat meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- b) Meningkatkan koordinasi: Formalisasi berperan dalam mengelola interaksi antar anggota organisasi dan menjelaskan dengan jelas tugas serta tanggung jawab masing-masing anggota. Dengan demikian, dapat meningkatkan koordinasi di antara anggota organisasi dan mengurangi potensi tumpang tindih tugas.
- c) Meningkatkan akuntabilitas: Formalisasi membantu menetapkan standar dan prosedur yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Ini dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka.
- d) Meningkatkan efisiensi: Penerapan formalisasi membantu mengatur tugas dan tanggung jawab secara terstruktur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi organisasi dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya.

Analisis Efektivitas Struktur Organisasi dalam Pemerintahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng

Organisasi berfungsi sebagai tempat kerjasama untuk melaksanakan tugas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, dalam konteks dinamis, organisasi

merupakan suatu proses yang melibatkan definisi dan pembagian kerja, termasuk pembatasan tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta penentuan hubungan antar komponen organisasi untuk mendukung kerja sama yang efektif dan efisien. Secara umum, struktur organisasi dapat diilustrasikan melalui diagram tertentu yang secara jelas menunjukkan tugas dan posisi setiap individu dalam organisasi tersebut. Struktur organisasi ini mencerminkan hierarki atau jabatan, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah, dan organisasi memiliki tujuan yang hendak dicapai melalui kolaborasi sekelompok orang yang terlibat di dalamnya. Beberapa faktor yang memengaruhi struktur organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng meliputi:

- a) Kewenangan daerah, yang merujuk pada Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang membentuk Perangkat Daerah untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan sesuai dengan prinsip otonomi dan Tugas Pembantuan.
- b) Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah, yang menetapkan jumlah dan susunan Perangkat Daerah berdasarkan volume beban tugas yang mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- c) Efisiensi, yang merujuk pada pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan perbandingan tingkat daya guna tertinggi yang dapat diperoleh.
- d) Pembagian habis tugas, yang melibatkan pembentukan Perangkat Daerah dengan tugas dan fungsi yang terbagi secara jelas, tidak memberikan beban tugas dan fungsi pada lebih dari satu perangkat daerah.
- e) Rentang kendali, yang menentukan perangkat daerah dan jumlah unit kerja berdasarkan kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.
- f) Tata kerja yang jelas, yang menekankan hubungan kerja yang jelas baik secara vertikal maupun horizontal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- g) Fleksibilitas, yang melibatkan penentuan tugas dan fungsi pada Perangkat Daerah untuk memberikan ruang bagi penyesuaian terhadap tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Buleleng menyusun uraian tugas pokok dan fungsi struktur organisasi dengan mencantumkan tujuan organisasi dan jabatan-jabatan yang ada dalam struktur organisasi. Pemerintah yang memiliki kewenangan dapat memengaruhi penyusunan struktur organisasi Kabupaten Buleleng agar lebih efisien, dengan memperhatikan pembagian tugas, cakupan kendali, fleksibilitas, serta merujuk pada tujuan organisasi dan jabatan-jabatan dalam struktur organisasi di lingkungan Kabupaten Buleleng.

Sekretariat DPRD Kabupaten Buleleng, sebagai organisasi perangkat daerah (DPO), memiliki banyak tugas dan tanggung jawab. Berdasarkan landasan filosofis, konsep dasar, dan visi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pelayanan pemerintahan dan pembangunan diselenggarakan secara lebih terarah oleh dan untuk daerah, dan oleh pemerintah, sebagai otoritas pusat yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasinya. Sebaliknya, daya saing semakin nyata sebagai akibat dari pembangunan global. (Keunggulan komparatif, kompeten, dan kolaboratif).

Oleh karena itu, di semua sektor yang bergantung pada fleksibilitas birokrasi yang berstruktur ringan namun kaya fungsional, optimalisasi, efisiensi, dan efektivitas diperlukan. Dalam melaksanakan fungsinya, Sekretariat Dewan mempunyai tanggung jawab untuk mengelola sekretariat Dewan, memastikan pengelolaan keuangan Dewan, menyediakan sarana untuk penyelenggaraan rapat Dewan, dan menyediakan dan mengoordinasikan staf khusus yang diperlukan oleh Dewan. serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pengurus sehubungan dengan tugas dan fungsinya (Peraturan Nomor 76 Tahun 2016). Untuk mendukung seluruh kegiatan Dewan, Badan Sekretaris Dewan harus menjadi organisasi yang mampu memberikan layanan prima dan mendukung seluruh kegiatan Dewan. Layanan prima harus dibarengi dengan prestasi kerja pegawai yang baik.

KESIMPULAN

Efektivitas kinerja suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh formalitas yang ada dalam struktur organisasi. Proses formalisasi membantu operasi organisasi tetap teratur dan stabil.

Formalisasi memastikan bahwa semua karyawan organisasi memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang diharapkan dari mereka dan bagaimana tugas dan tanggung jawab mereka harus dilakukan. Ini dicapai melalui penerapan kebijakan, prosedur, dan aturan yang jelas. Ini mengurangi kemungkinan kekacauan dan kesalahan saat mengerjakan tugas. Pengambilan keputusan yang efektif dan efisien juga lebih mudah dilakukan dengan formalisasi. Proses pengambilan keputusan dapat lebih terorganisir dan terstruktur jika ada aturan dan struktur yang ditulis. Dalam struktur organisasi, setiap level memiliki peran dan wewenang yang jelas. Ini memudahkan komunikasi dan kerja sama yang efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Terlalu tingginya formalisasi juga dapat berdampak negatif pada kinerja. Jika terlalu banyak birokrat, itu dapat menghambat fleksibilitas dan kreativitas dalam suatu organisasi. Jika sebuah organisasi terlalu bergantung pada peraturan dan prosedur tertulis, itu dapat menghalangi karyawannya untuk mengadaptasi dan mengembangkan ide baru dengan cepat.

Perlu ada keseimbangan antara formalisasi yang diperlukan untuk menjaga konsistensi dan stabilitas dan fleksibilitas yang diperlukan untuk menangani tantangan dan perubahan dalam lingkungan bisnis yang dinamis. Formalisasi dalam struktur organisasi dapat bermanfaat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja. Dengan aturan dan indikator kinerja yang jelas, organisasi dapat secara sistematis melacak pencapaian tujuan mereka dan memantau bagaimana kinerja mereka berjalan. Selain itu, ini memungkinkan adanya tanggung jawab yang jelas dan dapat dilihat dalam menjalankan tugas.

Referensi

- Fianda Gammahendra, Djamhur Hamid, Muhammad Faisal Riza. (2014). Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Organisasi . Jurnal Administrasi Bisnis Vol. 7 No.2 .
- Hasniati, Badu Ahmad, Andi Ahmad Yani, Siti Fatimah, Nining Haslianda Zainal. (2019). Pengukuran Tingkat Formalisasi pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar. Bidang Ilmu Administrasi, Akuntansi, Bisnis, dan Humaniora.
- Jaelani, S. M. (2021). Teori Organisasi . Semarang: Yayasan prima Agus Teknik Redaksi. Nyoman Ary Juru, A.A.N Eddy Supriyadinata Gorda. (2021). Analisis Struktur Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif>.
- Ramadan. (2020). Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Efektivitas Kerja.
- Taufiq Wahyudi, Herman Sjahrudin, Mustafa Gani. (2017). *Pengaruh Struktur Organisasi Terhadap Efektivitas Kerja Karyawan Pada PT. INTI KARSA PERSADA (KALLA HOSPITALLY) Makassar*. Makassar.